

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **BUDGET ISSUE BRIEF**

## **Politik & Keamanan**

*Vol. 02, Ed. 4, Maret 2022*

**Kondisi Infrastruktur TIK dalam Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

**Hal. 1**

**Derajat Desentralisasi Fiskal di Indonesia Menurun, Baik atau Buruk?**

**Hal. 3**

**Potensi Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Keamanan Nasional**

**Hal. 5**



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

**BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

Working Professionally and Heartfully to Support  
Legislative Budgetary Function



## **Daftar Isi**

<b>Kondisi Infrastruktur TIK dalam Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) .....</b>	<b>1</b>
<b>Derajat Desentralisasi Fiskal di Indonesia Menurun, Baik atau Buruk? .....</b>	<b>3</b>
<b>Potensi Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Keamanan Nasional .....</b>	<b>5</b>

## **Dewan Redaksi**

### **Penanggung Jawab**

Drs. Helmizar, M.E.

### **Pemimpin Redaksi**

Rendy Alvaro

### **Redaktur**

Ratna Christianingrum \* Ade Nurul Aida

Tio Riyono \* Riza Aditya Syafri

### **Editor**

Satrio Arga Effendi

### **Sekretariat**

Husnul Latifah \* Musbiyatun

*Budget Issue Brief* Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

# Kondisi Infrastruktur TIK dalam Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

## HIGHLIGHT

- Dengan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan SPBE, peran infrastruktur TIK menjadi sangat penting sebagai salah satu indikator keberhasilan implementasi SPBE.
- Indeks Kematangan SPBE Indonesia tahun 2021 sebesar 2,24 dari skala 5
- Indeks *e-Government* Indonesia pada tahun 2020 masih sangat rendah, yakni sebesar 0,66. Indeks tersebut menjadikan Indonesia berada pada posisi 88 dari 193 negara di dunia, atau posisi ke 7 dari 10 negara ASEAN.
- Indonesia masih jauh tertinggal dalam Indikator *Telecommunication Infrastructure Index* (TII) atau infrastruktur telekomunikasi, berada pada posisi yang sejajar dengan negara Ghana, Yordania, dan Kamboja.
- Hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia memiliki server untuk menyimpan dan mengelola data sendiri, namun belum sepenuhnya berstandar nasional maupun internasional.

Pembangunan infrastruktur Indonesia saat ini berfokus pada kegiatan dalam mendorong pemulihan ekonomi serta reformasi struktural, yang salah satunya dilakukan melalui transformasi digital. Hal tersebut sebagaimana diamanahkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2022 maupun RPJMN tahun 2020-2024. Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga berkomitmen serta mendukung program transformasi digital dengan terus mengalokasikan APBN melalui investasi di bidang infrastruktur digital. Sejak tahun 2019 hingga 2022, besaran total investasi APBN yang dialokasikan untuk infrastruktur digital mencapai Rp75 triliun, yang salah satunya dimanfaatkan dalam mendukung transformasi digital dalam pemerintahan serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi guna memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dalam penyelenggaraan pemerintah. Tentunya dengan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan tersebut, peran infrastruktur TIK menjadi sangat penting sebagai salah satu indikator keberhasilan implementasi SPBE. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan melihat gambaran implementasi SPBE khususnya terkait dukungan infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK).

### Kondisi Penerapan SPBE : Infrastruktur TIK

Melalui Revolusi TIK, penerapan SPBE menjadikan pemerintah memiliki kesempatan untuk terus berinovasi pada pembangunan aparatur negara. Penggunaan TIK tersebut tentunya bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pelaku bisnis, aparatur sipil negara, instansi pemerintah, maupun pihak-pihak lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sejauh ini Kementerian atau Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) telah melaksanakan SPBE dengan masing-masing memiliki tingkat kematangan yang berbeda. Dari evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilakukan oleh Kemenpan terhadap 517 K/L, maupun pemda menunjukkan bahwa indeks SPBE Indonesia secara nasional berada pada indeks 2,24 (skala 5). Dimana indeks tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,26, sementara target SPBE hingga 2025 mencapai indeks 2,6. Berdasarkan hasil evaluasi juga diperoleh bahwa terdapat 9 instansi pemerintah mendapatkan predikat sangat baik, antara lain: Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kab. Sumedang, Pemerintah Kab. Banyuwangi, dan Pemerintah Kab. Bantul. Kemudian juga terdapat 150 instansi pemerintah berpredikat baik, 228 berpredikat cukup, dan masih ada 130 instansi pemerintah yang berpredikat kurang. Selain itu, antara indeks kematangan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah juga memiliki kesenjangan yang cukup besar (Gambar 1).

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

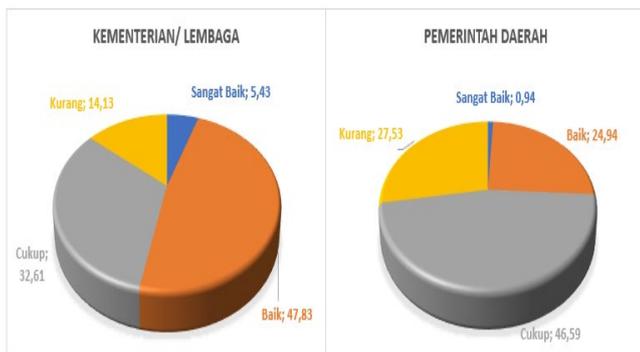
### Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

**Redaktur:** Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

**Penulis:** Ade Nurul Aida

**Gambar 1. Komposisi Predikat Penerapan SPBE pada K/L dan Pemda Daerah (Persen)**



Sumber: Kepmen PAN RB RI Nomor 1503 Tahun 2021, diolah

Berdasarkan hasil *e-Government Development Index* (EGDI), oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (2020), bahwa pada tahun 2020, Indonesia memperoleh skor Indeks sebesar 0,66. Indeks *e-Government* Indonesia tersebut rendah jika disandingkan negara lain, khususnya pada negara di kawasan ASEAN. Indonesia berada pada peringkat 88 dari 193 negara di dunia, atau berada pada peringkat ke 7 dari 10 negara ASEAN, jauh tertinggal dibanding negara Singapura, Malaysia, maupun Thailand (Tabel 1).

**Tabel 1. Indeks *e-Government* Negara ASEAN**

Negara	Indeks <i>e-Government</i>	Peringkat
Singapura	0,92	11
Malaysia	0,79	47
Thailand	0,76	57
Brunei Darussalam	0,74	60
Filipina	0,74	77
Vietnam	0,67	86
Indonesia	0,66	88
Kamboja	0,51	124
Myanmar	0,43	146
Laos	0,33	167

Sumber: *e-Government Survey 2020*, UN (2020), diolah

Dari laporan tersebut juga diketahui bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dalam indikator *Telecommunication Infrastructure Index* (TII) atau infrastruktur telekomunikasi, berada pada posisi yang sejajar dengan negara Ghana, Yordania, dan Kamboja. Padahal, dasar konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna yakni melalui infrastruktur TIK khususnya jaringan telekomunikasi. Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung terhadap aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi. Infrastruktur teknologi informasi berupa akses internet secara menyeluruh belum dapat dinikmati khususnya pada wilayah pedalaman, dan tentunya menjadi kendala dalam implementasi SPBE atau *e-Government*. Hal ini tercermin dengan adanya desa/kelurahan yang

belum terliput layanan 4G yakni sebesar 12.548 desa atau kelurahan, dengan rincian sebanyak 9.113 desa atau kelurahan pada wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), serta sebanyak 3.435 desa/kelurahan non 3T, sementara pemerintah menargetkan pada layanan 4G dapat mencakup seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Kemudian kondisi rendahnya akses internet juga masih dirasakan. Berdasarkan data *Speedtest Global Index 2022*, posisi Indonesia berada pada peringkat 103 dari 140 negara didunia dalam hal kecepatan akses internet *mobile*, dan posisi 115 dari 179 negara didunia dalam kecepatan *fixed broadband*. Disisi lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya disektor kesehatan, masih terdapat puskesmas dan Rumah Sakit (RS) yang belum terjangkau akses internet, yakni sebesar 3.126 dari 10.133 fasilitas kesehatan yang tersedia hingga tahun 2020. Sementara di sektor pendidikan, masih terdapat satuan pendidikan yang meskipun memiliki listrik, namun tak tersentuh internet sebanyak 33.227. Sisanya masih terdapat satuan pendidikan baik tak tersentuh listrik maupun internet yang mencapai 7.552. (Kominfo, 2020; Katadata, 2020).

Di sisi lain, masih belum sepenuhnya data center yang berstandarisasi nasional maupun internasional. Menurut Prof.Dr. Ing. Ir. Kalamullah Ramli, MEng (2021), sebagian besar instansi pemerintahan saat ini lebih mengutamakan pengembangan aplikasi serta penyediaan *server room* tanpa didukung sepenuhnya dengan *data center*. Padahal kehandalan data center amat dibutuhkan dalam *data analytic* maupun *big data* khususnya ketika memasuki era industri 4.0. Hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia memiliki server untuk menyimpan dan mengelola data sendiri, namun masih terbatasnya data di server Indonesia yang memenuhi standar nasional dan internasional. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan basis data di antara instansi pemerintah yang memuat data sejenis, dan tentunya menjadi kendala dalam penerapan SPBE. (TopBusiness.id, 2021). Untuk itu diperlukan percepatan pemerataan pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi khususnya pada wilayah 3T. Selain itu penting dilakukan sinergi dan kolaborasi penggunaan *data center* yang berstandar internasional.

# Derajat Desentralisasi Fiskal di Indonesia Menurun, Baik atau Buruk?

## HIGHLIGHT

- Desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan kemandirian di daerah, baik dalam pengelolaan keuangan daerah, maupun untuk menggali potensi daerahnya, sehingga dalam jangka panjang tidak bergantung pada pemerintah pusat.
- Tren Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan masih sangat sedikit daerah yang telah berstatus mandiri.
- Ditengah belum mandirinya daerah, alokasi TKDD justru cenderung stagnan dan menurun.
- Namun, menurunnya alokasi TKDD belum tentu menjadi suatu hal yang negatif jika melihat alokasi penggunaan anggaran di daerah, yang sebagiannya di peruntukan untuk belanja pegawai dan belanja barang & jasa.
- Terdapat beberapa upaya untuk dapat meningkatkan kemandirian fiskal, diantaranya optimalisasi BUMD & BLU, mendorong UMKM dan industri kreatif, kolaborasi dengan swasta (*startup, e-commerce*), dan implementasi UU HKPD.

Implementasi otonomi daerah serta desentralisasi fiskal ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah, baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, maupun untuk dapat menggali potensi daerah yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya tidak lagi bergantung kepada anggaran dari pemerintah pusat. Dilihat dari tujuan desentralisasi fiskal tersebut, pada kenyataannya setelah lebih dari 2 dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal, masih sangat sedikit daerah yang dapat berstatus mandiri secara fiskal, dilihat dari Indeks Kemandirian Fiskalnya (IKF). Semakin besar IKF, mengindikasikan bahwa sebagian besar belanja daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2018-2020, secara rata-rata hanya terdapat 22,76% provinsi yang berstatus mandiri, dan hanya ada 0,61% kabupaten/kota yang berstatus mandiri selama tahun 2018-2020.

Tabel 1. Perkembangan IKF Pemerintah Daerah 2018-2020

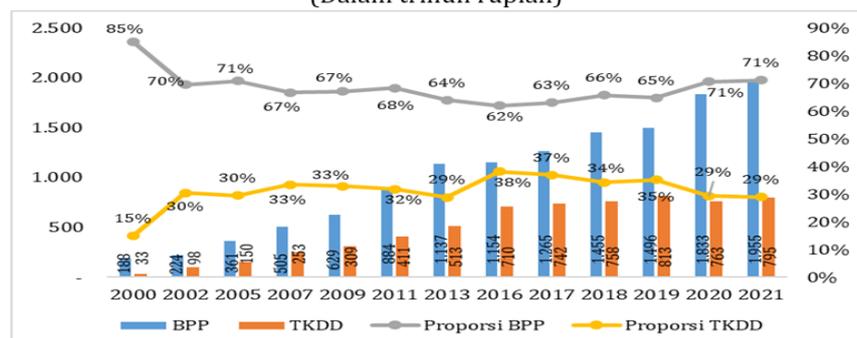
Derajat Kemandirian Fiskal	2018		2019		2020	
	Provinsi	Kab/Kota	Provinsi	Kab/Kota	Provinsi	Kab/Kota
Sangat Rendah (IKF < 0,25)	10	471	8	458	10	433
Rendah (IKF > 0,25 - 0,50)	16	34	18	36	16	34
Sedang (IKF > 0,50 - 0,75)	8	2	8	2	7	3
Tinggi (IKF > 0,75)	0	1	0	1	0	0
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>508</b>	<b>34</b>	<b>497</b>	<b>33</b>	<b>470</b>

\*Notes: perbedaan total sampel dikarenakan belum tersedianya laporan keuangan beberapa penda saat data diambil.

Sumber: BPK, diolah.

Kendati banyak daerah yang masih belum mandiri secara fiskal, alih-alih menambah jumlah alokasi TKDD bagi pemerintah daerah, proporsi TKDD sejak tahun 2002 justru cenderung stagnan, bahkan menurun terutama dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2000, proporsi TKDD cenderung berada di sekitar 30% – 35%. Proporsi TKDD tertinggi ada pada tahun 2016, dengan proporsi TKDD sebesar 38% dari total belanja negara. Adapun, sejak tahun 2017 hingga 2021, proporsi TKDD terhadap belanja negara justru cenderung mengalami penurunan. Penurunan proporsi TKDD terbesar terjadi tahun 2020 dan 2021, sebagai akibat pandemi Covid-19, dimana APBN di fokuskan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Gambar 1. Data Realisasi BPP dan TKDD Tahun 2000 – 2021 (Dalam triliun rupiah)



Sumber: LKPP, diolah.

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Riza Aditya Syafri · Nova Aulia Bella

Pertanyaan sesungguhnya yang perlu diidentifikasi adalah apakah dengan stagnan, bahkan menurunnya proporsi TKDD dalam beberapa tahun terakhir, merupakan suatu indikasi yang buruk terhadap proses pembangunan di daerah kedepannya? atau justru sebaliknya. Jika mengacu kepada data belanja daerah berdasarkan jenisnya secara nasional (Tabel 2), terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir realisasi belanja pegawai serta belanja barang & jasa merupakan yang tertinggi, dengan rata-rata proporsi belanja pegawai tahun 2016-2021 sebesar 33,7%, sementara belanja barang dan jasa sebesar 24,4%. Sedangkan, belanja modal yang justru lebih produktif untuk dapat mendorong peningkatan PAD, merupakan yang paling rendah. Rata-rata proporsi belanja modal dari tahun 2016-2021 hanya sebesar 17,9%.

Berdasarkan data pada Tabel 2 disamping, dapat menjadi gambaran bahwa meskipun alokasi TKDD ditingkatkan secara signifikan sekalipun, dengan pola belanja daerah yang cenderung kurang produktif, akan sulit untuk dapat meningkatkan PAD bagi pemda, sehingga kemandirian fiskal tetap akan sulit dicapai. Hal tersebut sejalan dengan beberapa tinjauan literatur yang menyebutkan adanya fenomena *flypaper effect* yang terjadi dari adanya transfer keuangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan cenderung meningkatkan pengeluaran daerah dari adanya transfer dari pemerintah pusat, tanpa berupaya untuk mendorong meningkatkan PAD nya. Oleh karena itu, peningkatan proporsi TKDD bagi pemerintah daerah tanpa adanya pola pengawasan dan pertanggungjawaban yang lebih jelas dan transparan, belum tentu akan berdampak baik bagi pembangunan daerah kedepannya.

**Tabel 2.** Proporsi Belanja Daerah Dilihat Dari Jenis Belanjanya Tahun 2016 – 2021

Proporsi Belanja Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	35,0%	33,7%	33,7%	32,4%	33,3%	34,1%
Belanja Barang & Jasa	20,8%	23,4%	24,5%	25,7%	24,5%	27,6%
<b>Belanja Modal</b>	<b>22,0%</b>	<b>20,0%</b>	<b>18,6%</b>	<b>18,4%</b>	<b>14,0%</b>	<b>14,6%</b>
Belanja Lainnya	22,1%	22,9%	23,2%	23,5%	28,2%	23,8%
<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Sumber: DJPK, diolah.

### Upaya Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah

Berbagai upaya sebenarnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mendorong kemandirian fiskalnya (meningkatkan PAD), terutama pada fase pemulihan ekonomi saat ini. **Pertama**, mengoptimalkan kinerja BUMD dan Badan Layanan Umum. Secara jumlah, BUMD di Indonesia sampai dengan tahun 2020 sebanyak 848. Dari jumlah tersebut, secara rata-rata 5 tahun terakhir 31,83% BUMD masih mengalami kerugian. Selain itu, dilihat dari sumbangannya terhadap PAD, secara keseluruhan kontribusi BUMD terhadap PAD baru hanya sekitar 3%. **Kedua**, mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan industri kreatif di daerah. UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Hanya saja akses permodalan serta akses ke pasar merupakan salah satu persoalan yang mengakibatkan UMKM dan industri kreatif tidak berkembang. Sehingga, diperlukan intervensi dari pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM dan industri kreatif.

**Ketiga**, mendorong investasi di daerah serta kolaborasi dengan pihak swasta (*startup*, *e-commerce*, dan lainnya). Investasi akan meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah dan membuka lapangan kerja di daerah. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta, terutama yang telah memiliki *platform* digital juga akan memberikan akses pasar bagi produk-produk unggulan di daerah, agar dapat dijangkau secara nasional bahkan membuka potensi untuk melakukan ekspor. **Keempat**, implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) juga diharapkan akan dapat mendorong peningkatan PAD. Simplifikasi jenis retribusi daerah dari 32 jenis menjadi 18 jenis diharapkan akan mendorong efektivitas dalam pemungutan retribusi daerah. Selain itu, pemberlakuan opsen pajak sebagai sesuatu yang baru, dimana sebelumnya beberapa jenis pajak masuk dalam komponen bagi hasil pajak (tidak termasuk komponen PAD), nantinya akan masuk sebagai opsen pajak, yang mana opsen pajak dihitung sebagai bagian dari PAD, sehingga perhitungan proporsi PAD dalam APBD kedepan tentunya akan meningkat.

# Potensi Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Keamanan Nasional

## HIGHLIGHT

- Salah satu dampak perang Rusia dan Ukraina ialah terjadinya *imported inflation* disertai dengan pelemahan nilai tukar rupiah.
- Perang Rusia dan Ukraina memperparah gangguan rantai pasokan global akibat pandemi Covid-19.
- Gangguan rantai pasokan global menyebabkan terjadinya peningkatan harga komoditas.
- Peningkatan harga komoditas global, diikuti dengan peningkatan harga domestik.
- Peningkatan harga kebutuhan pokok di tengah penurunan daya beli masyarakat menyebabkan adanya peningkatan angka kriminalitas.
- Terdapat 14 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan angka kriminalitas di masa pandemi Covid-19.
- Angka kriminalitas dimungkinkan akan terus mengalami peningkatan apabila terjadi peningkatan harga-harga kebutuhan pokok.
- Adanya peningkatan harga kebutuhan pokok juga menyebabkan terjadinya penimbunan.

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

### Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

**Redaktur:** Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafr

**Penulis:** Tio Riyono · Ratna Christianingrum · Azizah Ulfa

Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Invasi ini dipicu adanya keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Perang antara Rusia dan Ukraina menjadikan 240 ribu warga sipil Ukraina sebagai korban, dimana 64 orang diantaranya tewas.

Walaupun Indonesia tidak terlibat dalam perang Rusia dan Ukraina, namun perang tersebut akan berdampak terhadap Indonesia. Salah satu dampak ekonomi yang akan dirasakan Indonesia ialah adanya *imported inflation*. Kenaikan harga barang impor dapat memicu inflasi (*imported inflation*). Biasanya inflasi ini dapat disertai dengan pelemahan nilai tukar rupiah.

Adanya perang Rusia dan Ukraina akan berdampak pada terganggunya rantai pasokan global. Saat ini rantai pasokan global sudah terganggu akibat pandemi Covid-19. Apabila konflik Rusia Ukraina terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang, maka rantai pasokan global akan semakin terganggu. Gangguan rantai pasokan global menyebabkan adanya peningkatan harga komoditas. Peningkatan harga komoditas akan menyebabkan peningkatan harga barang impor, yang pada akhirnya memicu terjadinya inflasi. Perang Rusia Ukraina berpeluang menyeret harga pangan, utamanya minyak goreng. Pasalnya, harga minyak goreng mengacu harga *Crude Palm Oil* (CPO) global. Belum lagi, harga minyak mentah yang terus melompat di atas US\$110 per barel. Hingga saat ini harga BBM di Amerika dan Eropa sudah mengalami peningkatan mencapai 30%.

Kenaikan harga minyak mentah diyakini bisa menggerogoti APBN tahun ini. Apalagi, sebagian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan listrik masyarakat masih disubsidi oleh pemerintah. Harga minyak dalam asumsi makro APBN pada tahun ini hanya US\$63 dolar per barel, jauh di bawah harga riil di pasar internasional. BPS melaporkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi pada bulan Januari 2022 mencapai 2,18% yoy. Inflasi yang terjadi dikarenakan adanya peningkatan harga komoditas dan kenaikan harga-harga pangan. Selain diakibatkan peningkatan adanya gangguan rantai pasokan global, kenaikan harga pangan di awal tahun 2022 juga dipicu oleh cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim dapat memicu terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Hal ini akan mengganggu proses panen beberapa bahan pangan, yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga pangan.

Sebagaimana diketahui bahwa Rusia dan Ukraina merupakan eksportir kuat pada komoditas tertentu. Menurut Gro Intelligence, Rusia dan Ukraina menyumbang sekitar 29% dari semua ekspor gandum global. Sementara menurut BPS (2021), Ukraina sebagai negara terbesar pengimpor gandum di Indonesia. Rusia memasok 27% dari impor minyak mentah Uni Eropa dan 41% dari impor gas alamnya.

## Peningkatan Angka Kriminalitas

Peningkatan harga bahan pangan yang cukup signifikan akan menurunkan daya beli masyarakat. Dimana daya beli masyarakat belum pulih akibat pandemi. Hal ini dapat menyebabkan adanya sekelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok akan menimbulkan adanya kerawanan sosial di masyarakat. Peningkatan tindak kriminalitas merupakan salah satu dampak dari adanya kerawanan sosial ini.

Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan Sebagian perusahaan untuk melakukan efisiensi karyawan. Hal ini mereka lakukan guna menurunkan ongkos produksi yang semakin mahal akibat adanya kenaikan harga komoditas. Apabila efisiensi karyawan dilakukan maka tingkat pengangguran di masyarakat akan semakin meningkat. Tingginya tingkat pengangguran akan menyebabkan timbulnya permasalahan sosial dan berpotensi untuk meningkatkan tindak kriminalitas.

Selama pandemi, BPS mencatat sebanyak 14 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan angka kriminalitas. Sedangkan pada tahun 2019 hanya terdapat 9 provinsi yang mengalami peningkatan angka kriminalitas. Provinsi Banten merupakan provinsi yang mengalami peningkatan kriminalitas tertinggi, yaitu sebesar 29,3%. Bentuk kriminalitas yang menonjol terdapat pada kasus pencurian, penipuan dan penggelapan. Peningkatan kriminalitas dan kejahatan ini diprediksi akan terus meningkat mengingat seiring semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat di tengah penurunan daya beli masyarakat. Hal ini mungkin terjadi mengingat lonjakan kasus kriminalitas yang terjadi secara merata pada struktur dan lapisan masyarakat. Sejumlah pelaku kriminal didapati tidak hanya dari kalangan masyarakat miskin namun juga berasal dari kelompok masyarakat menengah.

Sebagian pelaku kriminalitas merupakan karyawan perusahaan yang diberhentikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lonjakan kriminalitas yang terjadi dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan yang memukul dunia industri, usaha, investasi dan perdagangan. Belajar dari dampak pandemi terhadap angka kriminalitas, maka akan sangat memungkinkan peningkatan harga barang kebutuhan pokok semakin meningkatkan angka kriminalitas yang terjadi.

## Maraknya penimbunan

Adanya peningkatan harga dapat menimbulkan spekulasi bagi kelompok masyarakat yang memiliki modal yang lebih. Masyarakat akan cenderung untuk membeli bahan makanan dalam jumlah besar dan melakukan penimbunan. Tidak sedikit juga pengusaha yang melakukan penimbunan bahan pokok guna mengantisipasi peningkatan harga. Hal ini apabila dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka akan berpotensi untuk semakin meningkatkan harga barang. Yang pada akhirnya inflasi yang terjadi semakin tidak terkendali.

Sebagai salah satu contoh yaitu kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia selama beberapa minggu terakhir, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengendus adanya praktik kartel. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar, namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng domestik. Saat pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai instrumen untuk mengendalikan harga, minyak goreng tidak tersedia di pasaran. Namun saat pemerintah menghapuskan HET minyak goreng, maka stok minyak goreng langsung melimpah di pasaran. Hal ini jelas mengindikasikan adanya penimbunan minyak goreng oleh spekulan.

## Upaya Pemerintah

Potensi gangguan sosial yang terjadi akibat kenaikan harga barang harus dapat dimitigasi oleh pemerintah. Untuk itu untuk mencegah kenaikan harga barang akibat pembelian yang berlebihan dan penimbunan, maka pemerintah perlu melakukan operasi pasar secara berkelanjutan. Selain itu POLRI perlu melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang rawan dengan permasalahan sosial. Dengan adanya pemetaan yang dilakukan diharapkan tindak kriminalitas dapat dicegah. Selain itu perlu adanya Kerjasama antar pihak untuk mengendalikan harga pangan, pemberian subsidi yang tepat sasaran, dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.